

29/3 2023

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN SIMPANG LIMA

Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of illegal parking in the Simpang Lima area is a serious problem faced by the City Government of Semarang. Simpang Lima is the heart of Semarang City and is the meeting point of five roads that unite. The problem that is often encountered is the large number of vehicle users who do not park their vehicles in the places provided by the government, as well as the many complaints regarding the collection of parking fees that are not in accordance with Mayor Regulation Number 9 of 2018 regarding public roadside parking fees. The purpose of this study is to analyze the internal and external environment of the Semarang City Transportation Service in controlling illegal public roadside parking in the Simpang Lima area, identify strategic issues, and formulate strategies to manage these issues. The research method used in this study is descriptive qualitative using primary data sources obtained through interviews and field observations as well as secondary data. In this study, researchers used SWOT analysis and Litmus tests as instruments to formulate the strategy needed to control illegal parking on public roads in the Simpang Lima area. The results of the study show that controlling illegal parking on the side of public roads in the Simpang Lima area cannot be said to be optimal, so a strategy is needed to reduce illegal parking and illegal parking attendants. The recommended and most strategic strategy is to implement electronic parking at several parking points in the Simpang Lima area. The aim of this strategy is to minimize illegal levies and increase local revenue both from parking taxes and parking fees.

Keywords: Strategy, Department of Transportation, Illegal Parking

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi perkembangan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh penduduk perkotaan yang tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana untuk mendukung segala aktivitas. Semakin pesat pertumbuhan penduduk maka semakin banyak infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai upaya mendukung mobilisasi penduduk yang merupakan salah satu perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk, transportasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi maupun sosial masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut.

Pada tahun 2018 tercatat penduduk Kota Semarang berjumlah 1.668.578 jiwa dan terus meningkat sampai pada tahun 2022 dengan jumlah 1.688.133 jiwa. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan jumlah transportasi atau kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang juga semakin meningkat. Menurut data dari

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Pada 2018 tercatat kendaraan dengan jumlah 1.588.190 kendaraan dan terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2021 dengan jumlah 1.875.781 kendaraan. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Semarang maka pemerintah daerah sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik atau disebut sebagai penyedia layanan publik, harus bisa menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk penertiban kendaraan berupa lahan parkir dan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Kota Semarang.

Parkir liar di tepi jalan umum menjadi masalah serius yang harus dihadapi Pemerintah Kota Semarang khususnya di kawasan Simpang Lima. Simpang Lima merupakan jantung Kota Semarang dan merupakan titik pertemuan dari lima jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan serta ada beberapa hotel berbintang, kuliner, dan pusat perbelanjaan berdiri di sekitarnya. Saat ini Simpang Lima sudah menjadi *landmark* atau ikon Kota Semarang yang biasa digunakan masyarakat karena merupakan pusat keramaian Kota Semarang. Sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2018 retribusi parkir tepi jalan umum dikenakan sebesar

Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua, Rp. 3.000 kendaraan roda empat, dan Rp.15.000 untuk kendaraan roda enam atau lebih. Sementara di beberapa titik di kawasan Simpang Lima Kota Semarang, ada beberapa juru parkir yang melakukan penarikan retribusi lebih dari ketentuan tersebut. Contohnya di sepanjang jalan Istana Brilliant sampai Plaza Simpang Lima, sudah terdapat larangan parkir kecuali pada jam 19.00-06.30. Namun, ada beberapa yang melanggar peraturan tersebut dengan parkir di tempat tersebut pada jam 16.34. Juru parkir juga melakukan penarikan uang parkir sebesar Rp. 3.000 untuk kendaraan roda 2. Padahal retribusi parkir bisa dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lumayan besar. Meskipun peraturan mengenai penertiban parkir sudah ada sejak lama, seringkali masyarakat masih belum memahami aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai penggunaan parkir di tepi jalan. Mereka memarkirkan kendaraannya secara sembarangan atau di tempat yang tidak seharusnya digunakan sebagai tempat parkir. Alasannya adalah pengguna kendaraan tidak ingin terlalu jauh berjalan kaki sehingga ia memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat yang akan dituju. Ketidakteraturan parkir kendaraan pada suatu tempat terutama kendaraan yang parkir di bahu jalan menyebabkan daya tampung kapasitas

jalan terbatas sehingga menghambat arus lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang lalu lintas dan perparkiran, mempunyai peran yang sangat penting didalam proses penertiban parkir di Kota Semarang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima”.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima.
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis menggunakan analisis SWOT
3. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu dengan menggunakan uji Tes Litmus

B. Kerangka Teori

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah satu dari beberapa instrumen analisis yang ampuh jika dipakai secara tepat dalam penyempurnaan pemikiran dari beragam kerangka kerja dan rencana strategi (*framework and strategic planning*). Analisis SWOT membantu perencana strategi dalam menyusun, membentuk, dan menerapkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan analisis dan diagnosis lingkungan baik di lingkungan internal maupun lingkungan eskternal organisasi.

Tabel 1.1

Matriks SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTHS (S) (Kekuatan)	WEAKNESSES (W) (Kelemahan)
OPPORTUNITIES (O) (Peluang)	STRATEGI SO Mengembangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Mengembangkan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) (Ancaman)	STRATEGI ST Mengembangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Mengembangkan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis (Rangkuti, 1998)

Dari matriks SWOT tersebut dapat diperoleh empat strategi, yaitu:

- a. Strategi SO (*strength, opportunity*) yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan

kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O) yang ada.

- b. Strategi WO (*weaknesses, opportunity*) yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
- c. Strategi ST (*strength, threat*) yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)
- d. Strategi WT (*weaknesses, threat*) yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T)

Hasil analisis SWOT ini disusun berdasarkan pada prioritas dan akan memberikan sebuah arah di mana organisasi akan memberiuken perumusan strategi yang dapat memperkecil kelemahan bahkan memprediksi ancaman di masa depan serta menghasilkan cara-cara untuk mengantisipasinya. Kemudian isu strategi tersebut dievaluasi untuk mengetahui tingkat strategis setiap isu dengan menggunakan Uji Tes Litmus (*Litmus Test*)

Uji Tes Litmus (*Litmus Test*)

Uji Tes Litmus berguna untuk mengembangkan sejumlah ukuran mengenai bagaimana strategisnya isu bersangkutan. Uji Tes Litmus dipergunakan untuk menyaring sejumlah isu strategis. Isu yang sungguh-sungguh strategis ialah isu yang mempunyai skor tinggi dalam seluruh dimensi, sementara isu operasional ialah isu yang skornya rendah dalam seluruh dimensi.

Uji Tes Litmus digunakan untuk mengembangkan beberapa ukuran tentang bagaimana tingkat kestrategisan suatu isu. Isu yang mempunyai skor tertinggi ialah isu yang paling strategis dan yang memiliki skor terendah ialah isu operasional. Penilaian skor tersebut ialah:

- 1) Skor 1 = isu yang bersifat operasional
- 2) Skor 2 = isu yang bersifat cukup strategis
- 3) Skor 3 = isu yang bersifat sangat strategis

Kemudian skor tersebut dikalikan dengan jumlah pertanyaan maka jumlah skor yang dihasilkan akan membentuk interval sebagai berikut:

- 1) Jika total skor 13-21 = isu kurang strategis

Isu yang kurang strategis berarti isu tersebut tidak harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan karena dampaknya yang kurang signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

- 2) Jika total skor 22-30 = isu cukup strategis

Isu cukup strategis berarti isu tersebut dapat dilaksanakan setelah isu yang sangat strategis terlaksana karena dampaknya yang cukup signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

- 3) Jika total skor 31-39 = isu sangat strategis

Isu sangat strategis berarti isu tersebut harus menjadi prioritas dan perhatian utama dalam pengambilan kebijakan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Persoalan Parkir

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, parkir adalah memanggalkan/menempatkan dengan

memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan parkir merupakan keinginan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran. Kegiatan parkir dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kegiatan parkir tetap, contohnya parkir pada pusat perdagangan, sekolah/ universitas, pusat perkantoran swasta/pemerintah, tempat rekreasi, hotel/penginapan, rumah sakit, dll
- b. Kegiatan parkir sementara, contohnya tempat pertandingan olahraga, bioskop, tempat ibadah

Parkir Liar

Parkir liar adalah kendaraan yang parkir di sembarang tempat yang bukan merupakan tempat parkir resmi yang disediakan oleh Pemerintah atau parkir di tempat yang berambu dilarang parkir/ dilarang stop. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 1, tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor sehingga parkir hanya diizinkan di tempat parkir yang tersedia seperti gedung parkir atau di

tepi jalan umum yang sudah diberi izin oleh pemerintah untuk digunakan sebagai tempat parkir. Parkir di tepi jalan umum yang tercipta karena keterbatasan tempat parkir atau tidak memiliki izin dari pemerintah dilarang karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan tersebut. Permasalahan parkir liar bukan hanya disebabkan oleh infrastruktur saja, namun juga pada pola pikir dan kesadaran diri dari masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (*mixed method*) yaitu dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Situs penelitian yang dipilih peneliti dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Semarang yang merupakan instansi yang bertugas menyelenggarakan, mengawasi, dan mengelola bidang perparkiran. Penelitian ini juga dilakukan di kawasan Simpang Lima Semarang. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima Kota Semarang yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, Petugas Parkir di kawasan Simpang Lima, dan pengguna parkir. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan

data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data nya menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, analisis SWOT, dan Tes Litmus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima yaitu Visi dan Misi Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana,

Visi dan Misi Organisasi

Selaras pada tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Semarang berperan menyukseskan pembangunan di Kota Semarang dengan mengacu pada misi ke 4 Pembangunan kota Semarang, yakni “Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota”. Salah satu sasaran untuk mendukung misi tersebut, yaitu

mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Rasio konektivitas kabupaten/ kota dan jumlah titik / ruas rawan macet. Namun, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Semarang belum berjalan sesuai target karena masih berjalan bertahap.

Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki 7 orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 23 orang pegawai yang berstatus sebagai pegawai Non ASN dan TPHL (Tenaga Pegawai Harian Lepas). Jika dilihat dari Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang jumlah pegawai tersebut secara kuantitas sudah mencukupi dan tiap tugas bisa terselesaikan secara baik. Dari segi kualitas, tingkat pendidikan pegawai bidang parkir di kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagian besar lulusan SMA sederajat dengan presentase 73,4%. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Perhubungan Kota Semarang mengadakan pelatihan-pelatihan khusus selama 2 kali dalam setahun. Pelatihan peningkatan SDM ini dilakukan oleh semua bidang yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang yang berupa mengkaji dan memahami dasar-dasar

hukum Dinas Perhubungan Kota Semarang serta pelatihan fisik.

Anggaran

Dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun 2023, dapat diketahui bahwa alokasi tahun 2023 di Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir sebesar Rp. 2.787.140.630 dana tersebut digunakan untuk mencapai program pengelolaan *Parkir on the Street* dengan target 88 persen dalam kurun waktu 12 bulan. Kondisi keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang di Bidang Parkir sudah mencukupi kebutuhan dalam menjalankan program untuk menertibkan parkir liar tepi jalan umum sehingga kondisi ini dapat menjadi kekuatan internal Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur, mengelola, dan menertibkan parkir liar tepi jalan umum khususnya di kawasan Simpang Lima.

Sarana dan Prasarana

Terdapat 7 lahan parkir tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah yang boleh digunakan untuk kegiatan perparkiran dari pukul 19.00 hingga 06.30 WIB. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan internal Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan parkir karena walaupun kegiatan parkir tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima baru boleh

dilakukan pada jam 19.00, tapi jumlah lahan yang telah disediakan sudah mencukupi untuk menjalankan kegiatan parkir. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menertibkan masalah perparkiran, Dinas Perhubungan memiliki fasilitas yang meliputi 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor yang digunakan untuk melakukan patroli mengelilingi seluruh titik parkir yang ada di Kota Semarang.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan seluruh elemen di luar organisasi yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan organisasi tersebut.

Faktor Sosial Budaya

Pelanggaran parkir liar di tepi jalan umum menjadi pandangan umum yang sudah biasa dijumpai oleh masyarakat pengguna jalan di kawasan Simpang Lima. Hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat yang memarkirkan kendaraannya tanpa memperdulikan rambu yang terpasang pada bahu jalan, padahal pemasangan rambu larangan parkir ini sudah dipasang di setiap titik di sekitar Simpang Lima. Pelaku pelanggaran ini sebagian besar dari pengunjung warung-warung di pedestrian dan pengunjung Lapangan Pancasila Simpang Lima.

masyarakat sudah mengetahui peraturan parkir tepi jalan umum yang memperbolehkan masyarakat untuk parkir di tepi jalan umum pada jam 19.00 sampai jam 06.30, serta masyarakat juga sudah mengetahui mengenai tarif parkir kendaraan sehingga dapat diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang mengindahkan rambu dan marka jalan dan lebih mementingkan urusannya karena tidak mau berjalan terlalu jauh dari tempat parkir. Pelanggaran parkir tersebut termasuk dalam tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau lalai dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

Faktor Ekonomi

Pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya ditempat yang tidak seharusnya demi menghemat pengeluarannya sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain pengguna parkir yang ingin kebutuhan sehari-harinya tercukupi, petugas parkir liar juga melakukan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan cara menarik tarif parkir dari masyarakat.

Faktor Teknologi

Perkembangan Teknologi dapat menjadi peluang dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima. Teknologi yang dimaksud adalah parkir dengan metode elektronik, yaitu pengguna parkir membayar parkir menggunakan *e-wallet/qris*. Adanya parkir elektronik dapat menjadi peluang Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan parkir karena dapat menghindari adanya pungutan liar dan mengatasi kebocoran pendapatan daerah yang berasal dari parkir. Namun peluang tersebut tak bisa dioptimalkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang karena masih banyak masyarakat yang belum dapat menggunakan *e-wallet/qris* untuk melakukan pembayaran parkir.

Faktor Politik

Diberlakukannya beberapa peraturan dan kebijakan mengenai parkir dapat menjadi peluang untuk lebih menertibkan dan mengelola parkir terutama di tepi jalan umum karena dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang harus dibayar oleh masyarakat kepada juru parkir di kawasan Simpang Lima. Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memasang papan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 di

beberapa titik parkir yang ada di kawasan Simpang Lima beserta rincian tarif parkir yang wajib dibayarkan seperti untuk kendaraan roda dua dikenakan sebesar Rp. 2.000, kendaraan roda empat dikenakan sebesar Rp. 3000, dan untuk kendaraan roda enam atau lebih dikenakan sebesar Rp.15.000.

Keterlibatan Stakeholders

Pemetaan *stakeholder* yang memiliki keterlibatan dalam penertiban parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima adalah pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Pemerintah sebagai stakeholder primer yang berperan sebagai kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan kebijakan dalam menertibkan parkir liar di kawasan Simpang Lima, dalam hal ini pihak pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah Polrestabes Semarang dan Satlantas. Selain pihak pemerintah, terdapat *stakeholder* Juru Parkir resmi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan parkir di kawasan Simpang Lima, serta masyarakat yang berperan sebagai pengguna jasa parkir.

Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud berupa perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan dan rambu yang ada serta keikutsertaan masyarakat dalam

mengurangi adanya parkir liar dan mentaati rambu atau peraturan yang ada. Namun masih banyak masyarakat yang tidak ikutserta dalam mentaati rambu dan peraturan sehingga banyak masyarakat yang tetap melanggar dan tidak memperdulikan adanya juru parkir liar, pungutan liar, dan penyempitan bahu jalan yang disebabkan oleh kegiatan parkir.

B. Analisis SWOT

Untuk mengidentifikasi isu strategis mana yang memberikan pengaruh bagi penertiban parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2.1

Matriks Analisis SWOT

Internal / Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<p>Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan yang sudah memadai Adanya program pelatihan untuk juru parkir resmi Anggaran yang memadai untuk menjalankan program penertiban parkir liar Lahan parkir yang disediakan memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Visi dan misi belum optimal Kualitas pegawai Dinas Perhubungan yang sebagian besar hanya lulusan SMA Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan yang kurang ketat Fasilitas yang diberikan untuk melakukan pengawasan kurang mencukupi
<p>Eksternal</p> <p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya teknologi parkir elektronik yang dapat mempermudah juru parkir dan pengguna parkir, serta mengurangi pungutan liar sehingga dapat meningkatkan PAD Diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 yang menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dan tarif parkir Kerjasama dengan <i>stakeholder</i> cukup memadai dalam penertiban parkir liar 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan parkir elektronik di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. (S3 O1) Menciptakan kawasan terlebar lalu lintas dengan menambah jumlah pemasangan papan peraturan, rambu parkir, dan pembatasan parkir (S3 O1) 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan patroli di titik parkir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat untuk menghindari ada pungutan liar dari juru parkir liar (W2 O1) Menegakkan peraturan tentang pelaksanaan parkir untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan penyuluhan dan peringatan kepada juru parkir liar (W2 O2)
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna parkir yang tidak memperdulikan peraturan Usaha pengguna dan juru parkir untuk mencukupi kebutuhannya Pengetahuan mengenai teknologi yang kurang untuk usia tua Kurangnya partisipasi pengguna parkir dalam penertiban parkir liar 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan sanksi yang akan didapat jika melanggar (S1 T1) Membuka lapangan pekerjaan dengan mengajak juru parkir liar untuk menjadi juru parkir resmi (S4 T2) 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Menambah jumlah personel untuk patroli pengawasan di kawasan Simpang Lima sehingga dapat dibagi untuk berjaga di beberapa titik parkir (W2 T1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran dengan sistem elektronik (W2 T3)

Sumber: Data yang diolah

Sesudah mengidentifikasi isu-isu strategis maka dapat diketahui yang menjadi isu-isu strategis dalam strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan parkir elektronik hanya di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. (S3 O1)
2. Menciptakan kawasan tertib lalu lintas dengan menambah jumlah pemasangan papan peraturan, rambu parkir, dan pembatasan parkir. (S3 O1)
3. Meningkatkan pengawasan patroli di titik parkir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat untuk menghindari ada pungutan liar dari juru parkir liar (W2 O1)
4. Menegakkan peraturan tentang pelaksanaan parkir untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan penyuluhan dan peringatan kepada juru parkir liar (W2 O2)
5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan sanksi yang akan didapat jika melanggar (S1 T1)
6. Membuka lapangan pekerjaan dengan mengajak juru parkir liar untuk menjadi juru parkir resmi (S4 T2)

7. Menambah jumlah personel untuk patroli pengawasan di kawasan Simpang Lima sehingga dapat dibagi untuk berjaga di beberapa titik parkir (W2 T1)
8. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran dengan sistem elektronik (W2 T3)

Setelah mengidentifikasi dan menentukan isu-isu strategis tersebut, tahap berikutnya ialah mengevaluasi isu-isu strategis memakai Tes Litmus yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat kestrategisan. Setiap isu diuji menggunakan 13 pertanyaan dari uji Tes Litmus, kemudian diberikan penilaian. Isu yang mempunyai skor yang tinggi merupakan isu yang paling strategis, sementara isu yang mempunyai skor rendah adalah isu operasional. Skor penilaian uji Tes Litmus adalah:

- 1) Skor 1 = isu yang bersifat operasional
- 2) Skor 2 = isu yang bersifat cukup strategis
- 3) Skor 3 = isu yang bersifat sangat strategis

Berikut merupakan hasil penilaian Tes Litmus pada masing-masing isu strategis dalam Strategi Dinas Perhubungan

Kota Semarang dalam menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Hasil Tes Litmus pada Isu-Isu Strategis

No	Pertanyaan	Isu Strategi							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapan peluang isu tersebut mampu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang?	3	2	1	1	1	1	2	3
2	Seberapa luas pengaruh isu tersebut terhadap Dinas Perhubungan Kota Semarang?	2	2	1	1	1	1	1	1
3	Seberapa banyak resiko/peluang keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang?	2	2	1	1	1	1	3	1
4	Apakah strategi bagi pemecah isu membutuhkan:								
	1. Pengembangan sasaran dan program pelayanan baru?	3	3	3	3	3	3	1	3
	2. Perubahan signifikan dalam sumber-sumber atau jumlah pajak?	3	1	1	1	1	3	1	1
	3. Perubahan signifikan dalam ketetapan/peraturan?	1	1	1	3	3	1	1	1
	4. Penambahan atau modifikasi fasilitas?	3	3	3	1	1	3	3	1
5. Penambahan staff yang signifikan?	3	1	3	1	1	3	3	1	
5	Bagaimana pendekatan terbaik bagi pemecah isu?	2	2	1	2	2	2	2	3
6	Tingkat manajemen manakah yang dapat menetapkan bagaimana menanggulangi isu?	3	2	2	2	2	2	2	2
7	Konsekuensi apakah yang mungkin terjadi bila isu tidak diselesaikan?	2	1	1	1	1	1	1	3
8	Seberapa banyak dinas lain yang dilibatkan oleh isu dalam pemecahan?	2	1	2	2	2	1	1	1
9	Bagaimana pengaruh isu ini terhadap nilai sosial, budaya, politik, ekonomi?	3	1	2	3	3	3	1	3
	Jumlah Skor	32	22	22	22	22	25	22	24

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tes Litmus di atas, isu-isu strategis sudah dijumlahkan dengan menggunakan metode Tes Litmus dan dapat diketahui isu mana yang harus diprioritaskan. Isu dengan skor paling tinggi adalah menerapkan parkir elektronik hanya di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. Isu tersebut diambil berdasarkan dari analisis kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Perumusan Program-Program Strategis

Terdapat delapan isu strategis yang telah diukur di atas menggunakan Tes Litmus sehingga tahap selanjutnya adalah merumuskan program-program strategis yang dihasilkan dari analisis dan identifikasi isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Menerapkan parkir elektronik di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a) Menyebarluaskan informasi mengenai penerapan parkir elektronik di beberapa titik kawasan Simpang Lima melalui media sosial maupun pemasangan poster di kawasan tempat parkir.

b) Memberi tarif yang lebih murah untuk parkir elektronik daripada parkir manual sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih parkir elektronik.

2. Menciptakan kawasan tertib lalu lintas dengan menambah jumlah pemasangan papan peraturan, rambu parkir, dan pembatasan parkir dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a) Penambahan papan peraturan dan rambu dilarang parkir di beberapa

- titik parkir kawasan Simpang Lima.
- b) Mengoptimalkan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan pengawasan patroli di titik parkir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat untuk menghindari ada pungutan liar dari juru parkir liar, dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan pemantauan dan penjagaan di kawasan Simpang Lima selama beberapa menit atau beberapa jam agar tidak muncul peluang bagi juru parkir liar dalam melakukan kegiatan parkir.
 - b) Menambahkan fasilitas kepada pengawas parkir untuk melakukan kegiatan patroli.
 4. Menegakkan peraturan tentang pelaksanaan parkir untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan penyuluhan dan peringatan kepada juru parkir liar, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a) Adanya upaya pembinaan bagi juru parkir terkait dengan penataan dan penarikan retribusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Memberi sanksi yang tegas terhadap juru parkir yang melanggar peraturan.
 5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan sanksi yang akan didapat jika melanggar dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut:
 - a) Memberikan himbauan langsung kepada masyarakat mengenai peraturan dalam kegiatan parkir.
 - b) Memberikan sanksi secara langsung kepada masyarakat yang melanggar agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.
 6. Membuka lapangan pekerjaan dengan mengajak juru parkir liar untuk menjadi juru parkir resmi dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Memberi pembinaan secara khusus kepada juru parkir liar agar menjadi juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.
 - b) Memberi pelatihan kepada juru parkir tersebut agar mematuhi peraturan dan ketentuan serta sanksi yang didapat jika melanggar.

7. Menambah jumlah personil untuk patroli pengawasan di kawasan Simpang Lima sehingga dapat dibagi untuk berjaga di beberapa titik parkir, dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a) Membagi regu pengawas parkir berdasarkan titik jaga parkir di Kota Semarang.
 - b) Melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti Satpol PP dalam melakukan pengawasan kegiatan parkir.
8. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran dengan sistem elektronik dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a) Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap teknologi dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran menggunakan *e-wallet/qr* secara berkala.
 - b) Pemasangan poster atau iklan mengenai tata cara pembayaran parkir dengan sistem elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi isu paling strategis adalah menerapkan parkir elektronik hanya di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. Isu ini dapat

ditetapkan sebagai isu paling strategis yang akan dijalankan untuk menertibkan parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima. Fokus strategi ini adalah meminimalkan adanya pungutan liar dan mengatasi kebocoran pendapatan daerah yang berasal dari parkir, adanya parkir elektronik juga dapat memberikan kenaikan yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari pajak parkir maupun retribusi parkir.

Kesimpulan

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut kemudian dapat dirumuskan delapan isu-isu strategis yang selanjutnya diidentifikasi menggunakan matriks SWOT. Selanjutnya delapan isu tersebut telah dihitung tingkat kestrategisannya dengan menggunakan uji Tes Litmus. Hasil dari Tes Litmus menunjukkan bahwa satu isu memiliki skor yang paling tinggi dengan skor 32 yaitu Menerapkan parkir elektronik hanya di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. Isu tersebut harus diprioritaskan tanpa mengurangi urgensi dari isu-isu lainnya sebagai upaya penertiban parkir liar tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima.

Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan program - program yang telah dirumuskan oleh

peneliti berdasarkan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal melalui analisis SWOT dan Tes Litmus yang nantinya dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan dan mengelola kegiatan parkir di kawasan Simpang Lima.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, P. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia.

Bryson, J. M. (2007). *Perencanaan Strategi* (Cet. VIII). Pustaka Pelajar.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>

<https://www.dispendukcakil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-12-08>

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan retribusi parkir di tepi jalan umum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 retribusi parkir tepi jalan umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rangkuti, F. (1998). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia

Pustaka Utama.

Rangkuti, F. (2015). *Personal SWOT Analysis*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sedarmayanti. (2018). *Manajemen STRATEGI* (N. F. Atif (ed.); Cet. 3). PT Refika Aditama.

Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik* (Cet. 1). Erlangga.

Suaedi, F. (2019). *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press.

Syafie, I. K. (2010). *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Cet. 2). PT Rineka Cipta.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wijaya, A. F., & Dinar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.